
Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

Sovia Risdiani*, Muzdalifah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*soviarisdiani625@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the rate of growth, level of contribution, level of effectiveness, and trends of motor vehicle taxes and motor vehicle name transfer fees to local taxes in the province of South Kalimantan. This research uses a descriptive quantitative analysis method; the data used is secondary data obtained from digital files available from the Regional Finance Agency and the official website of the Central Statistics Agency of South Kalimantan Province, which is accessed through the website.

The results of this study are the average motor vehicle tax growth rate of 11% and the transfer fee of motor vehicle names by 6%. The contribution rate of motor vehicle tax is 24.71% on average, and the transfer of motor vehicle name transfer fee is 22.75%. The effectiveness of motorized vehicle taxes is, on average, 100%, and the transfer fee for motorized vehicles is 99.3%. Then the trend method that is good for both taxes is the quadratic trend method..

Keyword: Motor Vehicle Tax; Motor Vehicle Title Fee; Local Tax

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat kontribusi, tingkat efektivitas dan tren dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari file digital yang tersedia dari Badan Keuangan Daerah dan situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang diakses melalui website.

Hasil penelitian ini yaitu rata-rata laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor sebesar 11% dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 6%. Tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar 24,71 % dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 22,75%. Tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar 100% dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 99,3%. Kemudian metode tren yang baik digunakan pada kedua pajak tersebut adalah metode tren kuadratis.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat diupayakan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlunya dana untuk memperlancar pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah. Tujuan dari adanya pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab serta tujuan lain yang telah direncanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 30, Pendapatan Daerah terdiri dari: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua diantaranya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak yang termasuk dalam pajak daerah Provinsi diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukiman, dan Pajak Rokok.

Tabel 1
Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Juta)

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor		Jumlah Penduduk	
		%		%
2010	1,54	10,83	3,64	4,19
2011	1,71	10,94	3,71	1,97
2012	1,92	12,24	3,78	1,90
2013	2,14	11,57	3,85	1,84
2014	2,44	13,61	3,92	1,77
2015	2,48	1,82	3,99	1,71
2016	2,70	8,99	4,06	1,65
2017	2,96	9,35	4,12	1,59
2018	3,11	5,32	4,18	1,53
2019	3,42	9,91	4,24	1,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 2% per tahun. Pertumbuhan penduduk juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya. Sampai pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 4,24 juta jiwa dan ditahun yang sama jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 3,42 juta unit. Kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan pungutan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor yang total pendapatannya akan disumbangkan ke pendapatan pajak daerah provinsi.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Daerah, PKB dan BBNKB di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	%	PKB		BBNKB	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	1.088	-	292	290	304	367
2011	1.644	51	329	361	463	513
2012	2.200	33	473	433	526	547
2013	2.137	-3	489	484	549	502
2014	2.948	38	522	548	514	485
2015	2.041	-31	559	556	449	382
2016	1.867	-8	568	587	356	435
2017	2.232	20	740	634	530	391
2018	2.816	26	656	681	560	527
2019	2.766	-2	721	731	560	540

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka (2010-2019)

Pendapatan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir tahun 2018 mencapai nominal sebesar Rp 2.816 Miliar, namun mengalami penurunan sebesar 2% sehingga pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 menjadi Rp 2.776 Miliar. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai sebesar Rp. 731 Miliar, penerimaan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2018 dengan realisasi sebesar Rp 681 Miliar. Sementara realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp 540 Miliar, meningkat dari sebelumnya yakni tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp 527 Miliar. Diketahui bahwa total pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010 sampai dengan 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan total Rp 2.948 Miliar dengan mengalami pertumbuhan sebesar 38% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2013.

Pokok-pokok yang dibahas pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 ? (2) Bagaimana Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 ? (3) Bagaimana Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 ? (4) Bagaimana Trend Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020-2025 ?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, (2) Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, (3) Untuk Mengetahui Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, (4) Untuk Mengetahui Trend Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020-2025.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan dan mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.

Pajak

Berdasarkan Undang Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang wewenangnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Maksud dari balik nama dalam hal ini adalah status kepemilikan yang berubah karena terjadi perpindahan hak milik kendaraan bermotor dari pemilik kendaraan bermotor sebelumnya dengan pembeli kendaraan bermotor sebagai pemilik yang baru.

Pertumbuhan

Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode. Menurut Halim (2004 : 163) dalam (Maharani, 2018) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pemerintah selama periode anggaran, mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.

Kontribusi

Menurut T Guritno (1997:76) dalam (Budiarso & Karina, 2016) mengidentifikasi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Efektivitas

Pengertian Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari Christa Marchaulina Sinaga (2013) yang berjudul Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkiraan penerimaan pajak air permukaan untuk lima tahun ke depan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peneliti terdahulu dari Hasannudin (2014) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor di provinsi Maluku Utara adalah efektif. Namun kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi Maluku Utara adalah kurang baik.

Penelitian terdahulu dari Nurul Karina (2016) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor

di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo adalah sedang.

METODE

Ruang lingkup penelitian ini adalah Pajak Daerah Provinsi. Jenis pajak yang termuat adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ruang lingkup penelitian ini adalah Pajak Daerah Provinsi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari file digital yang tersedia dari Badan Keuangan Daerah dan situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang diakses melalui website.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor baik milik pribadi atau umum yang digunakan di darat maupun di air yang digerakkan oleh peralatan teknik.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena adanya perjanjian dari dua pihak atau yang biasa terjadi karena adanya transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi atau bentuk file digital yang tersedia dari Badan Keuangan Daerah dan situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang diakses melalui website.

Teknik Analisis Data

Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pemerintah selama periode anggaran, mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pajak dapat diketahui dari rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{penerimaan pajak tahun } t - \text{penerimaan pajak tahun } (t - 1)}{\text{penerimaan pajak } (t - 1)} \times 100\%$$

Analisis Kontribusi

Menurut Guritno (1997:76) dalam (Budiarso & Karina, 2016) pengertian kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan Pajak Daerah. Perhitungan tingkat kontribusi menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$X = Y/Z \times 100\%$$

Dimana:

X = Rasio kontribusi pungutan pajak

Y = Realisasi penerimaan PKB dan atau realisasi penerimaan BBNKB

Z = Realisasi penerimaan Pajak Daerah

Analisis Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) dalam Hasannudin & Wokas (2014) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Perhitungan tingkat efektivitas menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$P = Q/R \times 100\%$$

Dimana:

P = Rasio efektivitas pungutan pajak

Q = Realisasi penerimaan PKB dan atau realisasi penerimaan BBNKB

R = Target penerimaan PKB dan atau target penerimaan BBNKB

Analisis Tren

Analisis Tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Beberapa metode yang digunakan adalah Metode Semi rata-rata (Semi Average Method), Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) dan Metode Kuadratis (Quadratic Trend Method)

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Perhitungan laju pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu 10 tahun yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Berikut adalah tabel pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan:

Tabel 3

Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah)

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan (%)	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan (%)
2010	290	-	-	367	-	-
2011	361	71	24,57%	513	146	39,88%
2012	433	72	19,94%	547	33	6,51%
2013	484	51	11,83%	502	-45	-8,22%
2014	548	64	13,15%	485	-17	-3,43%
2015	556	8	1,52%	382	-103	-21,17%
2016	587	31	5,59%	435	53	13,89%
2017	634	47	7,99%	391	-44	-10,10%
2018	681	47	7,45%	527	136	34,86%
2019	731	50	7,34%	540	13	2,48%
Rata-rata			11%	6%		

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas rata-rata pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 11% pada tahun 2010 sampai 2019. Secara keseluruhan realisasi pajak ini pada tahun 2010 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan namun dengan selisih yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun sehingga persentase pertumbuhannya fluktuatif dan menurun, namun kembali stabil pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 24,57% dengan selisih Rp 71 Miliar dari realisasi tahun 2010. Kemudian pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya mencapai 1,52% dengan selisih pendapatan sebesar Rp 8 Miliar dari tahun 2014. Sehingga pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum dikatakan berhasil karena rata-rata pertumbuhan >30% yaitu hanya mencapai 11%.

Selanjutnya untuk realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai 2019 cenderung mengalami fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan BBNKB hanya mencapai 6% pada kurun waktu 10 tahun. Terdapat pertumbuhan negatif yang terjadi pada beberapa tahun diantaranya tahun 2013-2015 dan tahun 2017.

Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase negative yaitu -21,17% realisasi menurun sebesar Rp 103 Miliar dari tahun sebelumnya. Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 39,88% dengan selisih Rp 146 Miliar dari realisasi tahun 2010 dan pertumbuhan pada tahun 2018 dengan persentase 34,86% dengan selisih realisasi sebesar Rp 136 Miliar dari tahun sebelumnya, namun peningkatan ini tidak sebesar tahun 2011.

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengetahui besaran tingkat kontribusi yang diberikan oleh total pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2010 – 2019. Berikut adalah tabel kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor:

Tabel 4
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
		Realisasi	Persentase	Kriteria	Realisasi	Persentase	Kriteria
2010	1088	290	26,61%	Sedang	367	33,72%	Cukup Baik
2011	1644	361	21,95%	Sedang	513	31,23%	Cukup Baik
2012	2200	433	19,67%	Kurang	547	24,85%	Sedang
2013	2137	484	22,65%	Sedang	502	23,48%	Sedang
2014	2948	548	18,57%	Kurang	485	16,43%	Kurang
2015	2041	556	27,24%	Sedang	382	18,72%	Kurang
2016	1867	587	31,43%	Cukup Baik	435	23,30%	Sedang
2017	2232	634	28,40%	Sedang	391	17,52%	Kurang
2018	2816	681	24,18%	Sedang	527	18,73%	Kurang
2019	2766	731	26,43%	Sedang	540	19,54%	Kurang
Rata-rata			24,71%	Sedang		22,75%	Sedang

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4 penerimaan total Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sampai 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah cenderung fluktuatif, rata-rata tingkat kontribusi mencapai 24,71% dengan kriteria sedang. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang dikatakan kurang terjadi pada tahun 2012 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 2.200 Miliar namun jumlah sumbangan PKB hanya sebesar Rp 433 Miliar atau 19,67% dan pada tahun 2014 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 2.948 Miliar namun jumlah sumbangan PKB hanya mencapai Rp 548 Miliar atau 18,57%.

Selanjutnya kontribusi dengan kriteria cukup baik terjadi pada tahun 2016 karena terjadi penurunan jumlah pendapatan pajak daerah menjadi Rp 1.867 Miliar, sedangkan jumlah sumbangan PKB meningkat sebesar Rp 587 Miliar atau 31,43% dari tahun sebelumnya. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki persentase dengan kriteria sedang selama kurun waktu 10 tahun dari 2010 sampai dengan 2019 yaitu terjadi pada 7 tahun lainnya kecuali tahun 2012, tahun 2014 dan tahun 2016.

Kemudian kontribusi yang terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pajak Daerah cenderung fluktuatif, rata-rata tingkat kontribusi mencapai 22,75% dengan kriteria sedang. Kontribusi BBNKB terhadap pajak daerah tidak begitu tinggi dikarenakan pada kurun waktu 10 tahun penerimaan pajak selalu mengalami fluktuasi tiap tahunnya.

Kontribusi terendah dengan kriteria kurang terjadi pada tahun 2014, karena berdasarkan data pendapatan pajak daerah bertambah sebesar Rp 811 Miliar dari tahun 2013. Sedangkan realisasi BBNKB pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 17 Miliar dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2014 BBNKB hanya berkontribusi sebesar 16,35% terhadap pajak daerah. Kontribusi dengan kriteria kurang juga terjadi pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Hal ini dapat terjadi karena ada penurunan realisasi BBNKB pada tahun tersebut, namun dengan total penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan. Penurunan realisasi dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah kendaraan bermotor yang baru dan juga dapat terjadi karena masyarakat tidak banyak yang melakukan balik nama kendaraan bermotor pada tahun tertentu.

Kemudian kontribusi dengan kriteria cukup baik terjadi pada tahun 2010 dengan persentase mencapai 33,72% dan pada tahun 2011 dengan persentase mencapai 33,23%. Hal ini dapat terjadi karena total pendapatan pajak daerah pada tahun tersebut belum mengalami jumlah yang besar yaitu Rp 1.088 Miliar di tahun 2010 dengan realisasi BBNKB sebesar Rp 367 Miliar dan di tahun 2012 total pajak daerah mencapai Rp 1.644 Miliar dengan realisasi BBNKB sebesar Rp 513 Miliar. Adapun kontribusi BBNKB dengan kriteria sedang hanya terjadi pada 3 tahun yaitu di tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2016.

Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Analisis efektivitas ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pencapaian dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap target yang telah ditetapkan. Analisis ini menghitung selama kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2010 – 2019.

Tabel 5
Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah)

Tahun	Target	Pajak Kendaraan Bermotor			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
		Realisasi	Persentase	Kriteria	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2010	292	290	99,22%	Efektif	304	367	120,72%	Sangat Efektif
2011	329	361	109,77%	Sangat Efektif	463	513	110,88%	Sangat Efektif
2012	473	433	91,56%	Efektif	526	547	103,90%	Sangat Efektif
2013	489	484	98,87%	Efektif	549	502	91,38%	Efektif
2014	522	548	104,89%	Sangat Efektif	514	485	94,28%	Efektif
2015	559	556	99,35%	Efektif	449	382	85,04%	Cukup
2016	568	587	103,32%	Sangat Efektif	356	435	122,11%	Sangat Efektif
2017	740	634	85,65%	Cukup	530	391	73,79%	Kurang Efektif
2018	656	681	103,85%	Sangat Efektif	560	527	94,23%	Efektif
2019	721	731	101,34%	Sangat Efektif	560	540	96,57%	Efektif
Rata-rata			100%	Efektif			99,3%	Efektif

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 5 target Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 sampai 2019 cenderung fluktuatif, namun dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terus meningkat. Pada kurun waktu 10 tahun tersebut, tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tidak sama setiap tahunnya. Tingkat efektivitas terendah dengan kriteria cukup terjadi pada tahun 2017 dengan persentase mencapai 85,65% dengan jumlah realisasi sebesar Rp 634 Miliar

dan target sebesar Rp 740 Miliar. Hal ini terjadi karena pada data diketahui bahwa realisasi PKB pada tahun tersebut telah mengalami peningkatan dari Rp 587 Miliar di tahun 2016 menjadi Rp 634 Miliar di tahun 2017, namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada target pajak yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 568 Miliar pada tahun 2016 dan menjadi Rp 740 Miliar di tahun 2017 dengan selisih target sebesar Rp 172 Miliar.

Adapun untuk beberapa tahun yang memiliki kriteria efektif dapat terjadi dikarenakan realisasi sudah mendekati target yang ditetapkan namun dengan selisih angka yang sedikit kurang dari target sehingga realisasi hanya mencapai lebih dari 90%. Kemudian untuk tahun yang dikatakan sangat efektif artinya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut sudah melebihi nominal target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga persentasi pendapatan mencapai lebih dari 100%. Berdasarkan data di tabel 5.5 diketahui rata-rata tingkat efektivitas pajak di tahun 2010 sampai dengan 2019 mencapai angka 100% sehingga dikatakan efektif.

Selanjutnya berdasarkan tabel diketahui target dan realisasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 sampai 2019 cenderung fluktuatif. Pada kurun waktu 10 tahun tersebut, tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tidak sama setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 target pajak mengalami peningkatan namun realisasi pajak juga mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat efektifitas BBNKB dikatakan sangat efektif. Selanjutnya kontribusi BBNKB dikatakan efektif pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini terjadi karena realisasi BBNKB pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan, tetapi untuk tahun 2018 dan 2019 realisasi mengalami peningkatan namun realisasi tersebut tidak mencapai target pajak yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2015 pemerintah menurunkan target pajak karena melihat data realisasi pada tahun sebelumnya yang terus menurun, namun realisasi BBNKB tetap mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar Rp 103 Miliar dari Rp 485 di tahun 2014 menjadi Rp 382 Miliar di tahun 2015. Oleh karena itu pada tahun 2015 tingkat efektivitas BBNKB hanya mencapai kriteria cukup sebesar 85,04%. Selanjutnya pada tahun 2016 pemerintah masih menurunkan besaran target pajak menjadi Rp 356 Miliar, namun realisasi pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari Rp 382 di tahun 2015 menjadi Rp 435 Miliar di tahun 2016 dengan selisih Rp 53 Miliar. Oleh karena itu tahun 2016 realisasi BBNKB dikatakan sangat efektif dengan persentase 122,11%.

Adapun kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 dikarenakan meningkatnya target pajak sebesar Rp 530 Miliar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 356 Miliar, sedangkan untuk realisasi pajak mengalami penurunan dari Rp 435 Miliar di tahun 2016 menjadi Rp 391 di tahun 2017 dengan selisih Rp 44 Miliar. Oleh karena itu realisasi tidak mencapai target sehingga dikatakan kurang efektif.

Analisis Trend Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemilihan tren yang lebih baik

Perhitungan kuadrat terkecil menggunakan data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan kurun waktu 10 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan nilai konsistensi yang paling rendah dari salah satu hasil perhitungan ketiga metode trend tersebut.

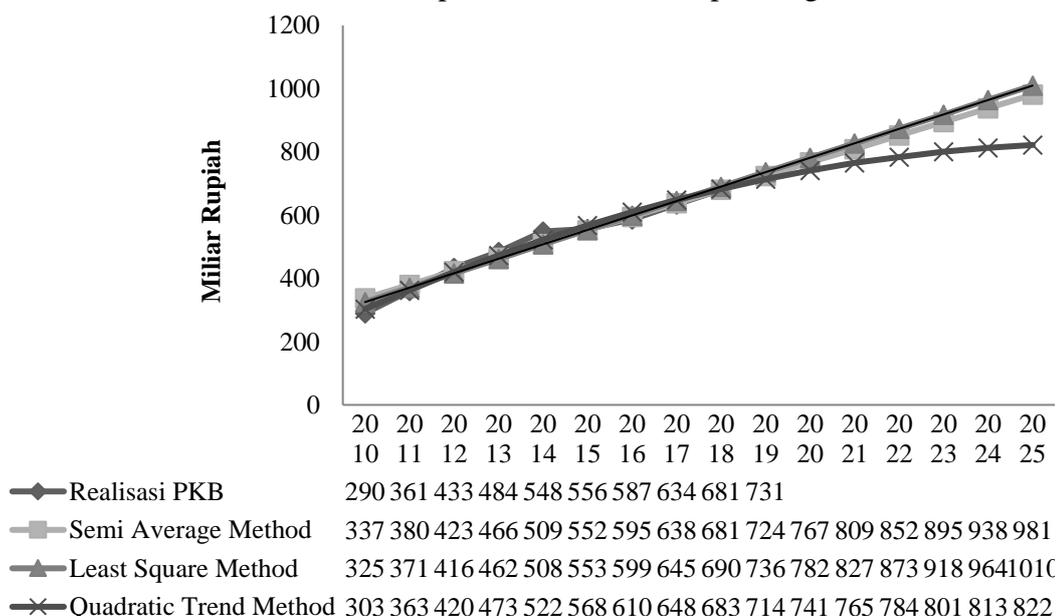
Tabel 6
Kuadrat Terkecil dari Semi Average Method, Least Square Method, dan Quadratic Trend Method

Tahun	PKB (Y)	Semi Average Method (Y')	Least Square Method (Y')	Quadratic Trend Method (Y')	Semi Average Method	Least Square Method	Quadratic Trend Method
					(Y-Y') ²	(Y-Y') ²	(Y-Y') ²
2010	290	337	325	303	2209	1225	169
2011	361	380	371	363	361	100	4
2012	433	423	416	420	100	289	169
2013	484	466	462	473	324	484	121
2014	548	509	508	522	1521	1600	676
2015	556	552	553	568	16	9	144
2016	587	595	599	610	64	144	529
2017	634	638	645	648	16	121	196
2018	681	681	690	683	0	81	4
2019	731	724	736	714	49	25	289
Jumlah					4660	4078	2301

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa dari ketiga perhitungan diatas menunjukkan konsistensi alat yang digunakan. Diketahui bahwa jumlah nilai dari masing-masing perhitungan ketiga metode pada Pajak Kendaraan Bermotor, terbentuk nilai pesimis (nilai terendah) adalah Quadratic Trend Method, nilai moderat (nilai sedang) adalah Least Square Method dan nilai optimis (nilai tertinggi) adalah Semi Average Method. Jadi terlihat jumlah nilai dari hasil perhitungan Quadratic Trend Method memiliki nilai yang paling kecil sehingga bisa dikatakan metode tersebut lebih tepat digunakan untuk menentukan proyeksi pajak.

Berikut adalah grafik perbandingan dari perhitungan metode tren Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2025:



Gambar 1
Trend Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: data diolah

Perbandingan pola dari masing-masing perhitungan ketiga metode dapat dilihat pada gambar grafik 1 bahwa prediksi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2020 sampai 2025 cenderung mengalami peningkatan. Garis tren dari perhitungan Least Square Method (metode kuadrat terkecil) meningkat membentuk pola linier garis lurus dengan ramalan realisasi pajak lebih tinggi dari tren Semi Average Method (metode semi rata-rata) dan Quadratic Trend Method (Metode Kuadratis). Sedangkan untuk garis trend dari perhitungan metode semi rata-rata juga membentuk garis lurus dengan ramalan realisasi yang lebih besar daripada ramalan metode kuadratis. Pola linier yang terbentuk dari metode kuadratis yaitu membentuk pola tidak linier. Oleh karena itu berdasarkan hasil perbandingan dari ketiga tren diatas, Pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menggunakan hasil proyeksi trend dari Quadratic Trend Method untuk meramalkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2020 sampai 2025, karena sebelumnya telah dilakukan perhitungan untuk menentukan metode tren konsisten yang lebih tepat digunakan.

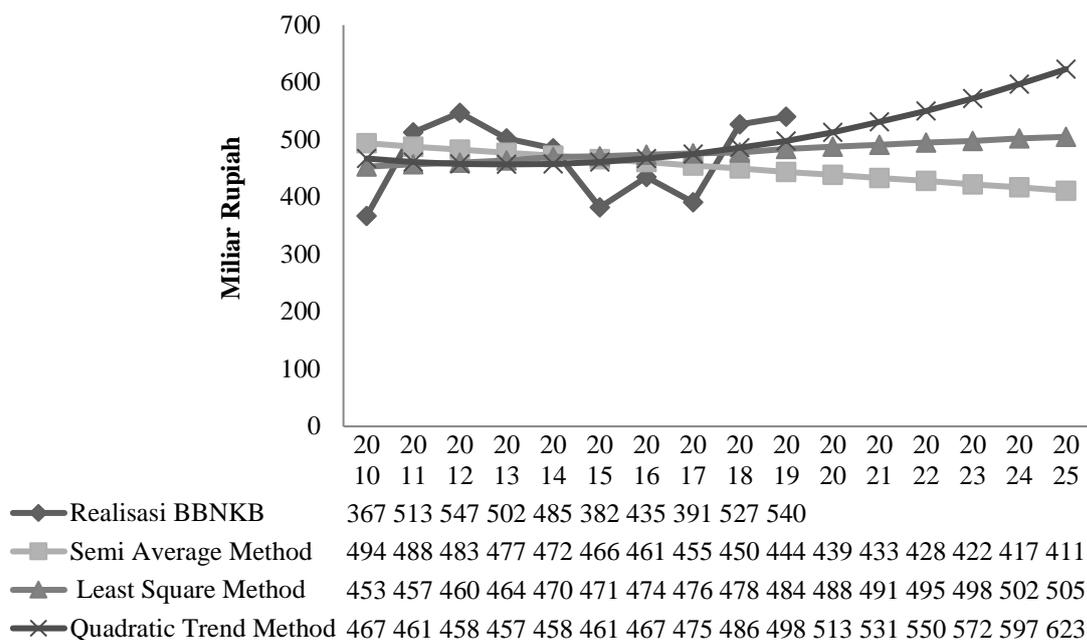
Tabel 7
Kuadrat Terkecil dari Semi Average Method, Least Square Method, dan Quadratic Trend Method

Tahun	BBN KB (Y)	Semi Average Method (Y')	Least Square Method (Y')	Quadratic Trend Method (Y')	Semi Average Method	Least Square Method	Quadratic Trend Method
					(Y-Y') ²	(Y-Y') ²	(Y-Y') ²
2010	367	494	453	467	16129	7396	10000
2011	513	488	457	461	625	3136	2704
2012	547	483	460	458	4096	7569	7921
2013	502	477	464	457	625	1444	2025
2014	485	472	467	458	169	324	729
2015	382	466	471	461	7056	7921	6241
2016	435	461	474	467	676	1521	1024
2017	391	455	478	475	4096	7569	7056
2018	527	449	481	486	6084	2116	1681
2019	540	444	484	498	9216	3136	1764
Jumlah					48772	42132	41145

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa dari ketiga perhitungan diatas menunjukkan nilai konsistensi alat yang digunakan. Diketahui bahwa jumlah nilai dari masing-masing perhitungan ketiga metode pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terbentuk nilai pesimis (nilai terendah) adalah Quadratic Trend Method, nilai moderat (nilai sedang) adalah Least Square Method dan nilai optimis (nilai tertinggi) adalah Semi Average Method. Jadi terlihat jumlah nilai dari hasil perhitungan Quadratic Trend Method memiliki nilai yang paling kecil sehingga bisa dikatakan metode tersebut lebih tepat digunakan untuk menentukan proyeksi pajak.

Berikut adalah grafik perbandingan dari perhitungan metode tren BBNKB di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2025:



Gambar 2
Trend Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sumber: data diolah

Gambar grafik diatas merupakan perbandingan trend dari ketiga metode yang dapat diketahui dengan garis trend yang berbeda-besa. Prediksi realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun 2020 sampai 2025 berdasarkan hasil dari trend Semi average method memiliki garis trend yang semakin menurun setiap tahunnya, hal ini terjadi karena pengaruh dari jumlah realisasi BBNKB sebelumnya yaitu pada tahun 2010 – 2019 yang cenderung berfluktuasi. Kemudian prediksi realisasi BBNKB berdasarkan Metode Last Square menghasilkan garis lurus yang meningkat landai. Selanjutnya prediksi realisasi BBNKB berdasarkan Metode Kuadratis menghasilkan garis trend yang meningkat membentuk parabola. Oleh karena itu berdasarkan hasil perbandingan dari ketiga tren diatas, Pemerintah daerah khusus nya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menggunakan hasil proyeksi trend dari Quadratic Trend Method untuk meramalkan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di tahun 2020 sampai 2025, karena sebelumnya telah dilakukan perhitungan untuk menentukan metode tren konsisten yang lebih tepat digunakan.

PENUTUP

Implikasi Hasil Penelitian

Menentukan besaran laju pertumbuhan, kontribusi, efektivitas dan nilai trend dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini dapat dijadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan Satuan Administrasi Satu Atap (SAMSAT) di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan kebijakan atau cara meningkatkan penerimaan kedua pajak tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun berikutnya yang akan datang.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sumber penerimaan pajak daerah terdiri dari beberapa bagian jenis pajak. Namun yang dibahas pada penelitian ini hanya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kesimpulan

Pertama, rata-rata pertumbuhan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 sebesar 11%, pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase mencapai 24,5% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase hanya mencapai 1,52%. Kemudian rata-rata pertumbuhan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 sebesar 6%, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase 39,88% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase -21,17%.

Kedua, rata – rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 24,71% dengan kriteria sedang. Kontribusi PKB tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase mencapai 31,43% dan masuk dalam kriteria cukup baik, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 18,57% sehingga masuk dalam kriteria kurang. Kemudian rata-rata Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 22,57% dengan kriteria sedang. Kontribusi BBNKB tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan persentase mencapai 33,72% dan masuk dalam kriteria cukup baik, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase mencapai 16,43% dan masuk dalam kriteria kurang.

Ketiga, rata – rata tingkat efektivitas dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 100% atau dikatakan sangat efektif. Kemudian Rata – rata tingkat efektivitas dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 99,3% atau dikatakan efektif. Tingkat efektivitas kedua pajak tersebut dikatakan efektif karena realisasi dari kedua pajak tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat, Berdasarkan pemilihan metode tren maka penentuan pemilihan tren pada PKB dan BBNKB dapat melihat dari hasil perhitungan ketiga metode. Dari ketiga metode tren menunjukkan nilai konsisten yaitu nilai proyeksi pesimis (nilai terendah) yaitu Quadratic Trend Method, nilai proyeksi moderat (nilai tengah) yaitu Least Square Method dan nilai proyeksi optimis (nilai tertinggi) yaitu Semi Average Method. Oleh karena itu berdasarkan teori, metode kuadratis (Quadratic Trend Method) dapat dipilih karena memiliki jumlah nilai yang terendah dan memiliki derajat kesalahan yang paling kecil dari metode tren lainnya.

Saran

Pertama, pemerintah daerah dapat meningkatkan besaran target pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk beberapa tahun yang akan datang, supaya pemerintah daerah bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target tersebut. Karena berdasarkan data dari realisasi kedua pajak tersebut sudah mampu mendekati dan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Kedua, Pemerintah Daerah kedepannya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya yang berada di daerah Kabupten/kota dengan memberikan fasilitas pembayaran pajak secara online serta mengaktifkan layanan samsat keliling untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian dan menambah alat analisis yang digunakan serta bisa menambah atau menggunakan jenis metode trend lainnya supaya mendapatkan perbandingan hasil yang lebih baik dan tepat digunakan untuk proyeksi pada tahun berikutnya.

BIBLIOGRAPHY

- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (2010-2019)*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka (2010-2019)*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Selatan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Budiarso, N., & Karina, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 715–722. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11774>
- Hasannudin, ., & Wokas, H. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara. *Accountability*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.32400/ja.4941.3.1.2014.56-65>
- Maharani, C. S. (2018). Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (n.d.). *Tentang Pendapatan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (2019). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomoer 23 Tahun 2014. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah* (p. 203).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 27(7).
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. (2020). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.